

Hambatan Utama Implementasi Merdeka Belajar pada Perguruan Tinggi Swasta

Abdul Mukti Bisri^{*1}, Abdul Muid² Nur Khamim³

¹Universitas Pesantren Kh. Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

² Universitas Qomaruddin Gresik, Indonesia

³ Institut Agama Islam Daruttaqwa Gresik, Indonesia

Email: Muktibisri@gmail.com, abdul11muid@gmail.com, hamimnur@insidagresik.ac.id

Submitted: 02-08-2023

Revised : 27-10-2023

Accepted: 30-11-2023

ABSTRACT. The Ministry of Education, Culture, and Research and Technology introduced the Independent Learning Independent Campus (MBKM) initiative to enhance students' preparedness for the workforce through active learning. In this regard, academic repositories like libraries, archives, and museums are crucial allies in supporting MBKM. These institutions possess the essential conditions, facilities, and infrastructure required for the success of the MBKM program. This research aimed to identify challenges encountered by private universities in East Java during the implementation of the program and to understand the obstacles they faced. Utilizing qualitative methods, including in-depth interviews and a literature review, the study found that the main hurdles include a lack of information, regulatory issues, and resource readiness. Consequently, addressing these challenges necessitates regulatory adjustments, curriculum revisions, and the introduction of new documentation focused on pure science to enhance professional education.

Keywords: *Barriers and Challenges, Independent Learning, Private Universities.*



<https://doi.org/10.54069/attadrib.v6i2.629>

How to Cite

Bisri, A. M. ., Muid, A., & Hamim, N. (2023). Hambatan Utama Implementasi Merdeka Belajar pada Perguruan Tinggi Swasta. *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 6(2), 409–416. <https://doi.org/10.54069/attadrib.v6i2.629>

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah program unggulan pemerintah di bidang pendidikan, Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar (MBKM) merupakan program yang dirancang untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif, mandiri, tidak membatasi dan diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja (Firmansyah et al., 2023; Wardiyah et al., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di perguruan tinggi swasta dari sisi kebijakan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode interviu survei, yang dikombinasikan dengan penelitian literatur, dengan populasi 15 perguruan tinggi swasta di propinsi Jawa Timur sebagai responden wawancara, obyek survey dan FGD.

Pendidikan tinggi di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dengan diperkenalkannya kebijakan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, atau yang dikenal dengan singkatan MBKM, merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian dan relevansi pendidikan tinggi dalam menghadapi tantangan global. Melalui MBKM, mahasiswa diberikan keleluasaan untuk menentukan jalannya sendiri dalam proses pembelajaran, memilih mata kuliah lintas disiplin, serta mengakses berbagai sumber belajar di luar kampus (Gea et al., 2022; Margaretha et al., 2023).

Kebijakan ini tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga mengajak perguruan tinggi untuk terlibat aktif dalam membangun ekosistem pendidikan yang responsif terhadap perkembangan zaman. Dalam konteks ini, riset tentang Merdeka Belajar menjadi penting untuk menggali pemahaman mendalam tentang implementasi kebijakan ini, tantangan yang dihadapi oleh berbagai pihak terkait, dan dampaknya terhadap pengalaman belajar mahasiswa (Mulyasa, 2021; N. Sari et al., 2023).

Perlu dicatat bahwa pada pengetahuan saya hingga Januari 2022, informasi spesifik tentang riset terdahulu mengenai Merdeka Belajar di lingkungan perguruan tinggi Indonesia mungkin tidak tersedia secara rinci. Namun, saya dapat memberikan gambaran umum tentang topik riset ini. Seiring dengan diperkenalkannya kebijakan Merdeka Belajar, banyak perguruan tinggi di Indonesia yang mulai mengarahkan perhatian riset mereka pada implementasi dan dampak kebijakan ini (Nanggala & Suryadi, 2020; Wardiyah et al., 2023). Riset-riset seperti ini dapat memberikan wawasan penting bagi pengambil kebijakan, pendidik, dan semua pemangku kepentingan di dunia pendidikan tinggi untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan implementasi Merdeka Belajar. Pada saat yang sama, riset tersebut juga dapat memotivasi perguruan tinggi untuk lebih baik dalam memahami dan memenuhi kebutuhan mahasiswa di era pendidikan yang terus berkembang (Barirohmah et al., 2021).

Beberapa penelitian telah dilakukan dan di terbitkan dalam Jurnal terakreditasi. Sebuah penelitian bertajuk “Implikasi dan Manfaat Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi Mahasiswa Universitas Trisakti” ditulis oleh (Septiani et al., 2022), mengungkapkan implikasi MBKM terhadap mahasiswa. Penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa Trisakti yang terlibat dalam program MBKM, khususnya program pertukaran mahasiswa, magang dan kewirausahaan, memberikan efek positif terhadap perkembangan dan prestasi mahasiswa secara signifikan.

Sebuah buku hasil penelitian MBKM secara komprehensif diterbitkan dengan judul “Membaca MBKM dalam Ilmu Komunikasi”, mengungkapkan pro dan kontra sejalan dengan penerapan MBKM dalam berbagai jenjang pendidikan, dimana pihak yang mendukung pelaksanaan kebijakan itu mengalir beragam narasi kebermanfaatan, keuntungan, dan beragam peluang demi anak didik yang memasuki kehidupan nyata selepas mendapat pendidikan, sementara pihak yang berkeberatan dengan kebijakan tersebut juga mengalir narasi tentang ketidaksiapan sistem pendidikan, lelahnya pengajar, dan kekalutan menghadapi perubahan tiba-tiba. ASPIKOM tergerak untuk memfasilitasi ruang diskusi bersama antara pengelola Program Studi (PS) Ilmu Komunikasi sekaligus anggota aktif guna menghasilkan persepsi yang sejajar tentang program MBKM (Jamiati, 2022).

Hasil dari diskusi ini akan membangun ruang pemahaman, meningkatkan sikap positif, dan akhirnya sebuah Program Studi akan mengetahui dan memahami keunikan, karakteristik khas untuk terus dikembangkan. Penelitian yang lebih teknis ditulis oleh (Fuadi & Aswita, 2021) dengan judul “Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Bagaimana Penerapan dan Kendala yang Dihadapi oleh Perguruan Tinggi Swasta di Aceh”, Membahas 2 topik penting, yaitu bagaimana implementasinya di PTS dan hambatan yang dihadapi di 8 PTS di Aceh. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan program bias diterapkan secara simultan, baik di dalam maupun di luar kampus.

Penelitian ini selanjutnya mengungkapkan tantangan yang dihadapi perguruan tinggi swasta dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), antara lain ; 1) proses adaptasi kurikulum KKNI dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 2) kampus mitra masih terbatas, 3) kerjasama perguruan tinggi swasta di Aceh dengan pihak luar baik perusahaan, BUMN, BUMD bahkan pemerintah masih belum optimal. masih sangat terbatas, 4) pengelolaan dana oleh yayasan yang belum menganggarkan dana Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 5) kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.

Beberapa literasi penelitian sebelumnya ditulis oleh Nora (Susilawati, 2021) menjelaskan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme, kemudian Siti (Mustaghfiroh, 2020) yang membahas tentang konsep MBKM yang memiliki arah dan tujuan yang sama dengan konsep aliran filsafat pendidikan progresivisme John Dewey.

Dari beberapa publikasi yang telah dikumpulkan, peneliti menemukan bahwa kendala utama implementasi MBKM di perguruan tinggi didominasi oleh permasalahan manajemen dan kebijakan kampus, dimana pemilihan program dan inovasi sangat ditentukan oleh faktor manajemen kampus atau unsur pimpinan dari perguruan tinggi (Børte et al., 2023). Hal ini juga terjadi di perguruan tinggi swasta, karena pimpinan lembaga berperan sangat strategis dalam menentukan inovasi kebijakan di kampus. Atas dasar tersebut peneliti menganggap perlu mengeksplorasi segala faktor yang mempengaruhi atau menghambat implemementasi dari sisi kebijakan di perguruan tinggi swasta, khususnya di Jawa Timur, dengan menentukan 15 sampel PTS dengan mengambil masing-masing 2 responden dari masing-masing lembaga, dengan tujuan menentukan factor apa sajakah yang sangat berpengaruh dalam menghambat implementasi MBKM di PTKIS.

Riset Merdeka Belajar tidak hanya memfokuskan pada aspek kebijakan, melainkan juga mengeksplorasi dinamika hubungan antara mahasiswa, dosen, dan lembaga pendidikan tinggi dalam menghadapi perubahan paradigma ini. Dengan merinci faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan implementasi MBKM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga dalam pengembangan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih adaptif dan relevan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di perguruan tinggi swasta dari sisi kebijakan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian ini adalah 15 perguruan tinggi swasta di propinsi Jawa Timur. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif (Arikunto, 2006). Ada beberapa metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain: Kuesioner: Buat kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kebijakan, sumber daya, dan dukungan staf dan dosen terhadap program MBKM. Pertanyaan dapat mencakup hal-hal seperti pemahaman dan penerapan kebijakan MBKM, ketersediaan sumber daya, dan tingkat dukungan dari staf dan dosen terhadap program tersebut.

Wawancara: melakukan wawancara dengan staf pengelola MBKM, dosen, dan pihak administrasi untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mendukung keberhasilan program MBKM. Wawancara dapat mencakup topik-topik seperti peran institusi dalam mendukung program MBKM, tantangan yang dihadapi, dan rekomendasi untuk perbaikan.

Focus discussion group (FGD)/Observasi Partisipatif: Melalui observasi partisipatif, bertujuan untuk mengamati secara langsung bagaimana kebijakan, sumber daya, dan dukungan staf dan dosen diterapkan dalam program MBKM. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan penerapan program tersebut. Sebelum instrument dibawa, dilakukan ujicoba instrumen penelitian kepada beberapa responden terlebih dahulu untuk memastikan kejelasan dan kesesuaian pertanyaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat beberapa faktor penghambat yang t mempengaruhi implementasi dan keberhasilan program MBKM. Beberapa faktor tersebut antara lain: 1) Kurangnya pemahaman dan kesadaran dimana masih banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami konsep dan manfaat program MBKM dapat menjadi faktor penghambat. Kurangnya kesadaran akan

pentingnya mengintegrasikan pekerjaan dengan studi dapat menghambat partisipasi mahasiswa dalam program ini (I. N. Sari et al., 2021). 2) Kendala kebijakan: Adanya kendala dalam kebijakan institusi atau peraturan yang membatasi atau tidak mendukung implementasi program MBKM. Hal ini dapat mencakup batasan waktu yang ketat, persyaratan yang rumit, atau kurangnya fleksibilitas dalam kebijakan pendukung MBKM. 3) Keterbatasan sumber daya: Keterbatasan sumber daya seperti anggaran, fasilitas, dan akses ke peluang kerja dapat menjadi penghambat dalam implementasi program MBKM. Mahasiswa mungkin kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bidang studi mereka jika sumber daya yang tersedia terbatas.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap program MBKM

Kurangnya informasi yang disampaikan disebabkan tidak cukup disosialisasikan dengan baik kepada mahasiswa dan pihak terkait, maka pemahaman dan kesadaran tentang program tersebut dapat terhambat (Mariati, 2021). Penting bagi institusi untuk secara aktif menyebarkan informasi mengenai manfaat, persyaratan, dan prosedur program MBKM kepada seluruh komunitas kampus. Sebagaimana responden yang ditanya peneliti mengenai hambatan terbesar dalam penerapan MBKM mengungkapkan hal tersebut. Hal ini memperkuat penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Yoga Budi (Bhakti et al., 2022), dimana kurangnya sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa menjadi kendala utama dalam penerapan MBKM di Perguruan Tinggi pada umumnya.

Hasil survey yang dirilis oleh Fakultas Psikologi UGM pada tahun 2021, bahwa mayoritas mahasiswa belum pernah mendengar atau mengetahui ada program pertukaran pelajar lintas program studi atau lintas perguruan tinggi. Sikitnya mahasiswa yang mengetahui adanya program MBKM ternyata juga dipengaruhi oleh tidak adanya atau kurangnya sosialisasi program MBKM.

Kurangnya sosialisasi program MBKM di perguruan tinggi swasta di Jawa Timur juga menjadi kendala utama implementasi program strategis ini di kalangan mereka. Responden kebanyakan menyayangkan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengelola perguruan tinggi, sebagian besar menyatakan sangat kurang, sehingga sampai tahun 2023 program MBKM minim sekali dilaksanakan, uali program yang sudah establish semacam PPL (Praktek Pengalaman Lapangan) yang dalam MBKM disebut Kampus Mengajar , dan KKN (Kuliah Kerja Lapang).

Untuk mengatasi kurangnya pemahaman dan kesadaran, institusi perlu meningkatkan upaya sosialisasi, komunikasi yang efektif, dan memperkuat dukungan terhadap program MBKM. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran, diharapkan partisipasi mahasiswa dalam program MBKM dapat meningkat pula (Arifin & Muslim, 2020).

Kebijakan Institusi dan Manajemen

Sebagian besar peserta penelitian menyatakan bahwa masalah manajemen atau kebijakan merupakan hambatan utama dalam penerapan MBKM. Kampus-kampus yang hingga tahun 2023 belum mengadopsi program MBKM sebagian besar disebabkan oleh kurangnya dukungan atau petunjuk dari kepemimpinan institusi, termasuk dari pimpinan PTKIS. Faktor-faktor ini dipicu oleh berbagai hambatan, seperti kurangnya informasi tentang pentingnya program ini bagi mahasiswa dan kemajuan lembaga. Para pengambil kebijakan belum melihat program ini sebagai prioritas atau sesuatu yang penting, karena dianggap bukan program yang wajib dan tidak ada sanksi jika tidak diimplementasikan.

Pembentukan kurikulum untuk menciptakan kampus yang merdeka dan mendukung kemandirian belajar sejatinya dipandu oleh pertimbangan terkait pendidikan tinggi dan fenomena globalisasi. Perubahan kurikulum di perguruan tinggi tentu membawa sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, apabila setiap hambatan dapat diidentifikasi dan dicegah dari berbagai perspektif, implementasi program MBKM dapat berjalan dengan lancar. Hasil penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi oleh Nor Syapika (Adila et al., 2023) dan rekan-rekannya di IAIN Palangkaraya mengungkapkan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan MBKM, antara lain 1) perubahan struktur kurikulum, 2) kesulitan Program Studi

dalam menyesuaikan beban mata kuliah dengan perguruan tinggi mitra, 3) kesulitan menemukan mitra untuk kerjasama, dan 4) sistem yang belum sepenuhnya mendukung program MBKM.

Dalam kebijakan Merdeka Belajar, dijelaskan bahwa Kampus Merdeka diharapkan dapat memenuhi tuntutan dunia kerja. Potensi masalah timbul jika implementasi Kebijakan Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka tidak sesuai dengan yang diharapkan, terutama karena perbedaan antara aturan yang ditetapkan dan pelaksanaannya. Hal ini menjadi relevan mengingat sebagian besar implementasi Kebijakan Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka baru dimulai pada tahun 2020 (Susetyo, 2020). Oleh karena itu, permasalahan dapat muncul saat kebijakan tersebut dijalankan. Menurut Ojat Darajat, MBKM memiliki empat program strategis, dan salah satunya adalah re-akreditasi yang bersifat otomatis. Namun, jika ada niat untuk meningkatkan peringkat dari C menjadi B, langkah-langkah perbaikan internal perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum mengajukan usulan re-akreditasi kepada BAN PT.

Pemangku kebijakan institusi mungkin tidak sepenuhnya memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam mengikuti program MBKM. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak mengakomodasi kebutuhan mahasiswa dalam mengintegrasikan pekerjaan dengan studi. Perbedaan prioritas dan tujuan institusi, dimana prioritas dan tujuan yang berbeda dalam mengembangkan program-program pendidikan. Jika program MBKM tidak dianggap sebagai prioritas utama, maka kebijakan yang mendukung implementasi program ini mungkin tidak diberikan perhatian yang cukup (Hakim & Iskandar, 2023).

Sebagian besar responden mengungkapkan hal tersebut diatas sebagai kendala utama implementasi kebijakan MBKM, dimana pihak yayasan maupun rektorat tidak memberikan instruksi untuk melaksanakan program tersebut di kampus. *“Essential to involve relevant stakeholders in the policy development process is to ensure a clear understanding of the benefits and needs of students regarding the MBKM program. (Yulisma et al., 2023) et al. expressed a similar sentiment, highlighting policy-related challenges in one of the programs, PMMDN (Domestic Independent Student Exchange Program). The research utilized a descriptive case study method and recommended two key points: 1) Ongoing evaluation of the organization at the central level for the MBKM-PMMDN program, and 2) Improvement needed in the implementation of the PMMDN program at the campus management unit.”*

Keterbatasan Sumberdaya dalam Implementasi program MBKM

Salah satu faktor penghambat implementasi MBKM, menurut sebagian besar responden adalah keterbatasan sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya lain seperti sarana dan keuangan. Keterbatasan anggaran merupakan jawaban yang pertama diungkapkan oleh responden, karena menurut mereka, dana adalah kendala terbesar dalam MBKM.

Perguruan Tinggi Swasta, terutama PTKIS memiliki anggaran terbatas, yang membatasi kemampuan mereka untuk menyediakan dukungan finansial kepada mahasiswa dalam mencari kesempatan kerja yang relevan. Kurangnya dana dapat mempengaruhi kemampuan mahasiswa untuk mengikuti magang, pelatihan, atau proyek-proyek yang berhubungan dengan bidang studi mereka (Makkulasse & Sari, 2018; Rahmansyah & Hutajulu, 2021; Rusdiana & Nasihudin, 2021).

Seiring dengan konsep yang telah disebutkan sebelumnya, sebuah studi yang dilakukan di Universitas Paramadina menunjukkan bahwa elemen-elemen yang mendukung implementasi program MBKM bagi mahasiswa melibatkan inisiatif aktif dari mahasiswa, adanya kemitraan, arahan dari universitas untuk menjalankan MBKM, serta dukungan dari pihak manajemen fakultas dan program studi dalam mengatur mekanisme konversi nilai. Beberapa faktor yang menjadi penghambat melibatkan pandangan negatif dari sebagian dosen terhadap program, kurangnya panduan teknis, dan keterbatasan sumber daya (Alfikalia et al., 2022).

Proses perancangan dan implementasi program MBKM dihadapkan pada berbagai tantangan di tingkat program studi. Walau demikian, adanya laporan mengenai kesuksesan program MBKM di beberapa lembaga memberikan optimisme bahwa, meskipun dalam keterbatasan yang ada, sejumlah program studi di Indonesia masih mampu menjalankan kebijakan

MBKM. Evaluasi dan refleksi terus diperlukan untuk memahami dengan lebih mendalam tantangan serta peluang yang muncul bagi program MBKM di Indonesia.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lilis Puspitawati (Puspitawati et al., 2023) dkk menguatkan statemen diatas, dimana beberapa faktor penghambat utama diantaranya adalah faktor finansial dan kapabilitas sumber daya manusia; serta dukungan pimpinan Perguruan Tinggi merupakan faktor-faktor penghambat terbesar dalam pelaksanaan program MBKM.

Sumberdaya lain yang menjadi hambatan pelaksanaan MBKM adalah Fasilitas, dimana institusi tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung program MBKM, terutama fasilitas akses ke dunia industry dan dunia usaha tempat mahasiswa akan melakukan program magang. Keterbatasan fasilitas dapat membatasi pilihan pekerjaan yang dapat diakses oleh mahasiswa. Hal ini berarti akses terbatas ke peluang kerja, institusi pendidikan mungkin tidak memiliki jaringan yang kuat dengan industri atau perusahaan, sehingga mahasiswa kesulitan mendapatkan akses ke peluang kerja yang sesuai dengan bidang studi mereka. Kurangnya hubungan dengan dunia kerja dapat menjadi penghambat dalam mencari kesempatan kerja yang relevan dengan program MBKM.

KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi program MBKM pada perguruan tinggi swasta. Metode penelitian yang digunakan menggunakan studi literatur dan lapangan terkait implementasi program MBKM. Hasil penelitian menunjukkan kendala program MBKM yang paling banyak ditemui adalah (1) Kurangnya informasi dalam memahami konsep dan manfaat program MBKM dan kesadaran akan pentingnya mengintegrasikan pekerjaan dengan. (2) Kendala kebijakan institusi atau peraturan yang membatasi atau tidak mendukung implementasi program (3) Keterbatasan sumber daya seperti SDM, anggaran, fasilitas, dan akses ke peluang kerja. Dengan identifikasi kendala yang ditemui dalam implementasi program MBKM dapat dijadikan sebagai alat evaluasi sehingga program MBKM ini menjadi lebih baik lagi dalam pelaksanaannya.

REFERENCES

- Adila, N. S., Nasution, A., Purba, W. N. Z., Sulistyowati, S., & Sukiman, S. (2023). Problematika Implementasi Kurikulum Mbkm (merdeka Belajar Kampus Merdeka) Di Program Studi Pgmi Iain Palangkaraya. *JRPD (Jurnal Riset Pendidikan Dasar)*, 6(1), Art. 1. <https://doi.org/10.26618/jrpd.v6i1.9810>
- Alfikalia, A., Haryanto, H. C., & Widyaningsih, A. (2022). Dinamika Pengelolaan Program Merdeka Belajar—Kampus Merdeka Pada Kampus Swasta. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 5(1), 111–123. <https://doi.org/10.30605/jsgp.5.1.2022.1557>
- Arifin, S., & Muslim, M. (2020). Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” Pada Perguruan Tinggi Islam Swasta Di Indonesia. *JURNAL PENDIDIKAN ISLAM AL-ILMI*, 3(1), Art. 1. <https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v3i1.589>
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Barirohmah, B., Nurmahmi, N., & Santosa, S. (2021). The Challenge of Good and Correct Indonesian Language in Higher Education. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), Art. 2. <https://doi.org/10.31538/ndh.v6i2.1483>
- Bhakti, Y. B., Simorangkir, M. R. R., Tjalla, A., & Sutisna, A. (2022). Kendala Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (mbkm) Di Perguruan Tinggi. *Research and Development Journal of Education*, 8(2), Art. 2. <https://doi.org/10.30998/rdje.v8i2.12865>
- Borte, K., Nesje, K., & Lillejord, S. (2023). Barriers to student active learning in higher education. *Teaching in Higher Education*, 28(3), 597–615. <https://doi.org/10.1080/13562517.2020.1839746>

- Firmansyah, C., Ubaidillah, U., & Busriyanti, B. (2023). Design of The “Merdeka Belajar” Program for Students of High School Education. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), Art. 1. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i1.328>
- Fuadi, T. M., & Aswita, D. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (mbkm): Bagaimana Penerapan Dan Kedala Yang Dihadapi Oleh Perguruan Tinggi Swasta Di Aceh. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 5(2), Art. 2. <https://doi.org/10.30601/dedikasi.v5i2.2051>
- Gea, S. H., Setiawati, D. T., Sukriyah, E., Siahaan, A., & Amiruddin. (2022). PAI Teachers’ Self Reflections on Differentiation Learning in the Independent Learning Curriculum. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), Art. 2. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v3i2.263>
- Hakim, M. N., & Iskandar, M. N. (2023). Pengembangan Bakat Dan Minat Dengan Manajemen Peserta Didik. *Kharisma: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 2(1), Art. 1. <https://doi.org/10.59373/kharisma.v2i1.17>
- Jamiati, K. N. (2022). *Membaca MBKM dalam Ilmu Komunikasi* (pp. 171–175). Buku Litera. <https://aspikom.org/publikasi/>
- Makkulasse, R., & Sari, N. I. (2018). Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia (msdm) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (ptkin). *Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussiness*, 1(1), Art. 1. <https://doi.org/10.24256/dinamis.v1i1.415>
- Margaretha, D. A., Nadlif, A., Astutik, A. P., & Hasan, S. (2023). Independent Learning-Independent Campus Policy Innovation at State Aliyah Madrasah. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), Art. 1. <https://doi.org/10.31538/ndh.v8i1.2942>
- Mariati, M. (2021). Tantangan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), Art. 1. <https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.405>
- Mulyasa, H. E. (2021). *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar*. Bumi Aksara.
- Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep “Merdeka Belajar” Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(1), 141–147. <https://doi.org/10.30605/jsgp.3.1.2020.248>
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2020). Analisis Konsep Kampus Merdeka Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10–23. <https://doi.org/10.33061/jgz.v9i2.4545>
- Puspitawati, L., Rohmawati, T., Solihat, M., Prayoga, I., & Surya, A. (2023). Survey Tingkat Pengetahuan Serta Kesiapan Dosen dan Mahasiswa dalam Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 6(1), Art. 1.
- Rahmansyah, A. A., & Hutajulu, P. E. (2021). Sistem Ujian Online Essay Kolektif Berbasis Gambar Studi Kasus Kampus PTKI Medan. *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, 5(3), Art. 3. <https://doi.org/10.30865/mib.v5i3.3029>
- Rusdiana, & Nasihudin. (2021). *PERAN PIMPINAN PTKIS: Dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis KKNI Menuju Akuntabilitas Perguruan Tinggi*. Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sari, I. N., Susyanti, J., Ambarwati, A., Ariani, B., Jurana, Martini, M., Marselinus, Heriteluna, Supeni, N., Arief, N. F., Nurmawati, Wahyuningsih, S., Subkhan, Taufiq, M., Saputro, A. N. C., Purnomo, A., Widiatsih, A., Amri, F., Karwanto, ... Hayat. (2021). *Dosen Merdeka*. UNISMA PRESS.
- Sari, N., Rafida, T., & Wijaya, C. (2023). Implementation of The Merdeka Campus Policy At Dharmawangsa University. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(01), Art. 01. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i01.4452>
- Septiani, W., Rinanti, A., Dewayana, T. S., Fachrul, M. F., Ischak, M., & Murwonugroho, W. (2022). Implikasi Dan Manfaat Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

- Bagi Mahasiswa Universitas Trisakti. *JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI*, 7(1), 130–140. <https://doi.org/10.25105/pdk.v7i1.12711>
- Susetyo, S. (2020). Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 29–43.
- Susilawati, N. (2021). Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme. *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3), 203–219. <https://doi.org/10.24036/sikola.v2i3.108>
- Wardiyah, J., Budianti, Y., Farabi, M. A., & Sirojuddin, A. (2023). Merdeka Belajar Activity Unit at Madrasah Aliyah: Program Evaluation Study Using CIPP Method. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), Art. 1. <https://doi.org/10.31538/nzh.v6i1.2633>
- Yulisma, L., Arifin, N. R., Setiadi, T., & Khoeriyah, N. D. (2023). Problematika Implementasi MBKM-PMMDN. *Jurnal Wabana Pendidikan*, 10(1), 19. <https://doi.org/10.25157/jwp.v10i1.9560>